



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 8587-8595

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Kinerja Keuangan BPRS di Jawa Barat Tahun 2024

Ai Kokoy Koyyimah¹, Aam Amarulloh²

¹Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

²Pendidikan Akuntansi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia

akoyyimah@upnvj.ac.id, amarulloh.aam01@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Jawa Barat tahun 2024 dengan menggunakan empat indikator utama, yaitu Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Non-Performing Financing (NPF), Return on Assets (ROA), dan Cash Ratio (CR). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling terhadap BPRS yang secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan lengkap melalui laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data yang dianalisis merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan masing-masing BPRS tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai KPMM sebesar 24% yang mencerminkan kondisi permodalan BPRS di Jawa Barat tergolong cukup sehat, meskipun terdapat disparitas antar lembaga. Nilai rata-rata NPF sebesar 8% mengindikasikan kualitas pembiayaan masih kurang baik. Nilai rata-rata ROA sebesar -0,5% menunjukkan bahwa secara umum BPRS mengalami kerugian dan belum mampu mengoptimalkan aset dalam menghasilkan laba. Sementara itu, nilai rata-rata Cash Ratio sebesar 23,5% menunjukkan kondisi likuiditas yang cukup baik meskipun masih terdapat perbedaan signifikan antar BPRS. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan BPRS di Jawa Barat masih perlu diperkuat terutama dalam aspek profitabilitas dan kualitas pembiayaan agar dapat menjaga stabilitas keuangan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, BPRS, KPMM, ROA, NPF, CR.

1. Latar Belakang

Dalam satu dekade terakhir, perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat keuangan syariah global. Salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dalam memperluas akses dan inklusi keuangan berbasis syariah, khususnya di sektor usaha mikro dan kecil, adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) atau sekarang disebut dengan Bank Perekonomian Rakyat syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tidak memberikan layanan dalam lalu lintas pembayaran. Fokus utama BPRS adalah menyalurkan pembiayaan kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Secara umum, BPRS berperan sebagai bank syariah yang berorientasi pada pembiayaan masyarakat kecil tanpa menyediakan fasilitas transaksi pembayaran, sehingga memiliki karakteristik yang berbeda dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang telah lebih dahulu dikenal oleh masyarakat Indonesia. (Maulana, 2022). BPRS beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah yang menjauhi praktik riba, gharar, dan maisir. Dengan demikian, BPRS memiliki kontribusi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem pembiayaan yang adil dan beretika. BPRS banyak memberikan kontribusi dan kemudahan kepada para nasabah untuk mendapatkan modal kerja, investasi maupun konsumtif. (Maulina et al., 2020)

Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan jumlah BPRS terbanyak di Indonesia. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024), terdapat lebih dari 25 BPRS yang beroperasi di Jawa Barat. Kinerja keuangan menjadi aspek yang sangat penting dalam menilai tingkat keberlanjutan dan daya saing BPRS di tengah dinamika industri keuangan syariah yang semakin kompetitif.

Kinerja keuangan merupakan cerminan keberhasilan suatu perusahaan dalam mengelola serta mengontrol aktivitas operasionalnya sesuai dengan ketentuan dan prinsip pengelolaan keuangan yang berlaku. (Fitri Findiani &

Maharani Maharani, 2023). Kinerja keuangan memberikan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu yang menunjukkan tingkat keberhasilan dalam mengelola keuangan. Tujuan utamanya adalah untuk menilai likuiditas, kecukupan modal, profitabilitas, serta efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan laba secara efisien. Melalui analisis kinerja keuangan, perusahaan dapat mengetahui posisi keuangannya dan membuat keputusan yang rasional dalam pengelolaan serta pengambilan kebijakan keuangan di masa mendatang. (Safkaur, 2021). Kinerja keuangan dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan perusahaan dalam mencapai hasil pengelolaan keuangan yang optimal. (Uci Rosalinda et al., 2022).

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dapat dilakukan melalui berbagai rasio keuangan, antara lain KPMM (Kriteria Penyediaan Modal Minimum), Return on Assets (ROA), NPF (Non Performing Financing) dan Cash Ratio (CR). Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana modal bank mampu menanggung risiko dari aset-aset yang dimilikinya. Berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia, setiap bank wajib menjaga rasio CAR minimal sebesar 8%. Modal yang digunakan untuk memenuhi ketentuan tersebut tidak hanya berasal dari modal sendiri, tetapi juga dapat bersumber dari pinjaman pihak luar serta laba tahun berjalan. (Hapsari, 2022).

ROA merupakan salah satu rasio yang menjadi tolak ukur kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. (Dessi Herliana & Setiadi, 2021). Return on Assets (ROA) mencerminkan tingkat efisiensi bank dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam memperoleh laba dan menunjukkan efektivitas pengelolaan aset yang baik. Sebaliknya, nilai ROA yang rendah menandakan bahwa aset belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam penelitian ini, ROA dijadikan sebagai indikator utama untuk mengukur kinerja perbankan, di mana peningkatan ROA menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi karena dengan jumlah aset yang sama bank mampu menghasilkan laba yang lebih besar. (Nurkhalifa et al., 2023)

Non-Performing Financing (NPF) menggambarkan kondisi ketika nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian, yang dapat menimbulkan potensi kerugian bagi bank. Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah menunjukkan penurunan kualitas aset dan berdampak negatif terhadap tingkat kesehatan bank syariah. (Veriana & Wirman, 2023). Semakin tinggi nilai NPF, semakin besar pula risiko pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan pendapatan dan laba bank. NPF dihitung dengan membandingkan total pembiayaan bermasalah (kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total pembiayaan yang diberikan. Oleh karena itu, rasio NPF yang tinggi menunjukkan lemahnya manajemen risiko dan menurunnya kualitas aset bank. (Pardede et al., 2023)

Cash Ratio digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan membandingkan aset yang paling likuid, yaitu kas dan setara kas, terhadap total kewajiban lancar yang dimiliki perusahaan. (Kharisma Aulia Insani & Nur Amalina, 2023). Cash Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan seberapa besar aset lancar yang dimiliki perusahaan, khususnya kas dan setara kas, yang dapat digunakan untuk melunasi utang jangka pendek saat ditagih. Cash Ratio mencerminkan tingkat likuiditas sebenarnya dari suatu perusahaan, yaitu sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajiban lancarnya menggunakan kas yang tersedia tanpa harus mengandalkan aset lain. (Anggrainy et al., 2023)

Kajian mengenai kinerja keuangan BPRS di Jawa Barat menjadi penting karena provinsi ini tidak hanya memiliki jumlah BPRS terbanyak, tetapi juga berperan sebagai tolok ukur perkembangan BPRS secara nasional. Melalui analisis terhadap kinerja keuangan BPRS di wilayah ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi empiris dalam memperkuat manajemen keuangan BPRS serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengembangan industri keuangan syariah di tingkat regional maupun nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Qanita (2021) pada BPRS Bhakti Sumekar di Kabupaten Sumenep terkait analisis kinerja keuangan menunjukkan bahwa kinerja keuangan BPRS Bhakti Sumekar selama tahun 2015–2019 mengalami penurunan. Kemudian penelitian Aini & Thoriq (2020) pada laporan keuangan PT. BPRS PNM Mentari 2019–2020 menggunakan analisis common size untuk mengukur kinerja keuangan menunjukkan bahwa kondisi keuangan bank kurang baik dan belum optimal dalam melakukan penghimpunan dana (funding) sehingga berdampak pada tingkat likuiditas. Selain itu penelitian Silfia et al. (2022) terkait kinerja keuangan pada BPRS HIK Parahyangan dengan melihat rasio ROA, ROE, dan FDR menunjukkan bahwa kinerja keuangan BPRS HIK Parahyangan secara umum berada dalam kondisi baik. Hal ini terlihat dari rasio ROA dan ROE yang mencerminkan kondisi baik hingga sangat baik, namun FDR menunjukkan kondisi yang kurang baik.

Kondisi tersebut menunjukkan hasil yang beragam mengenai kinerja keuangan BPRS di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan karena pentingnya memahami kondisi aktual kinerja keuangan BPRS di Jawa Barat, mengingat provinsi ini merupakan wilayah dengan jumlah BPRS terbanyak di Indonesia dan berperan penting dalam mendukung perkembangan ekonomi berbasis syariah di tingkat daerah. Selain itu, kinerja keuangan BPRS menjadi indikator utama dalam menilai kesehatan lembaga keuangan syariah serta efektivitas pengelolaan dana masyarakat dan pembiayaan sektor riil.

Berbagai penelitian terdahulu telah menganalisis kinerja keuangan BPRS namun sebagian besar masih terbatas pada studi kasus tunggal, misalnya hanya meneliti satu BPRS di suatu daerah tertentu. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa hasil-hasil penelitian tersebut belum mampu memberikan gambaran yang representatif mengenai kondisi industri BPRS dalam lingkup yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melakukan analisis yang lebih luas dan komprehensif terhadap seluruh BPRS di Jawa Barat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada ruang lingkup analisis yang lebih luas dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yaitu dengan melibatkan seluruh BPRS di Jawa Barat tahun 2024, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kinerja keuangan industri BPRS di wilayah provinsi dengan BPRS terbanyak di Indonesia. Dengan demikian, pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana gambaran kinerja keuangan BPRS di Jawa Barat tahun 2024 ditinjau dari rasio KPMM, NPF, ROA dan CR. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan BPRS di Jawa Barat tahun 2024 berdasarkan rasio KPMM, NPF, ROA dan CR.

2. Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024. Pendekatan ini dipilih agar mampu menjelaskan fenomena keuangan secara objektif berdasarkan data numerik yang bersumber dari laporan keuangan.

Objek penelitian meliputi seluruh BPRS yang beroperasi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan adalah BPRS yang secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan lengkap dan dapat diakses melalui laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode penelitian. Dengan demikian, hanya BPRS yang memiliki data keuangan yang valid dan terpublikasi secara lengkap yang dijadikan sampel penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, menelaah, dan mencatat informasi dari laporan keuangan tahunan BPRS yang diterbitkan oleh OJK maupun yang tersedia di situs resmi masing-masing BPRS. Data yang digunakan meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta laporan rasio keuangan yang relevan dengan analisis kinerja bank.

Analisis kinerja keuangan dilakukan dengan mengukur beberapa rasio keuangan utama, antara lain rasio kecukupan modal (KPMM), rasio profitabilitas yang diwakili oleh Return on Assets (ROA) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), rasio likuiditas Current Ratio (CR), serta rasio kualitas pembiayaan Non-Performing Financing (NPF).

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, dengan cara menghitung dan membandingkan nilai rata-rata, nilai tertinggi dan nilai terendah untuk melihat performa bank dari setiap indikator yang diukur. Hasil analisis ini kemudian diinterpretasikan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja keuangan BPRS di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024.

3. Hasil dan Diskusi

Data BPRS di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 1. Terdapat 26 BPRS yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Barat.

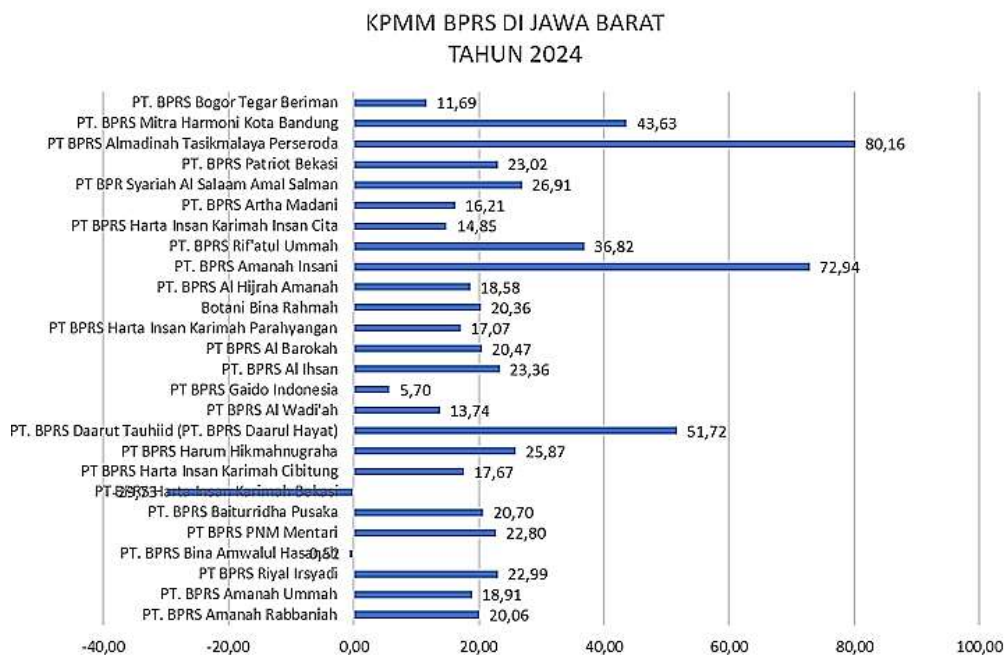
Tabel 1. Kinerja Keuangan BPRS Jawa Barat tahun 2024

No	BPRS	Lokasi
1	PT. BPRS Amanah Rabbaniah	Kab. Bandung
2	PT. BPRS Amanah Ummah	Kab. Bogor
3	PT BPRS Riyal Irsyadi	Kota Bekasi
4	PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah	Kota Depok
5	PT BPRS PNM Mentari	Kab. Garut
6	PT. BPRS Baiturridha Pusaka	Kota Bandung
7	PT BPRS Harta Insan Karimah Bekasi	Kota Bekasi
8	PT BPRS Harta Insan Karimah Cibitung	Kota Bekasi
9	PT BPRS Harum Hikmahnugraha	Kab. Garut
10	PT. BPRS Daarut Tauhiid (PT. BPRS Daarul Hayat)	Kota Cimahi
11	PT BPRS Al Wadi'ah	Kota Tasikmalaya
12	PT BPRS Gaido Indonesia	Kab. Cianjur
13	PT. BPRS Al Ihsan	Kab. Bandung
14	PT BPRS Al Barokah	Kota Depok
15	PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan	Kab. Bandung
16	Botani Bina Rahmah	Kab. Bogor
17	PT. BPRS Al Hijrah Amanah	Kota Depok
18	PT. BPRS Amanah Insani	Kab. Bekasi
19	PT. BPRS Rif'atul Ummah	Kab. Bogor
20	PT BPRS Harta Insan Karimah Insan Cita	Kab. Bogor
21	PT. BPRS Artha Madani	Kota Bekasi
22	PT BPR Syariah Al Salaam Amal Salman	Kota Depok
23	PT. BPRS Patriot Bekasi	Kota Bekasi
24	PT BPRS Almadinah Tasikmalaya Perseroda	Kota Tasikmalaya
25	PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung	Kota Bandung
26	PT. BPRS Bogor Tegar Beriman	Kab. Bogor

Adapun penjelasan gambar setiap rasio kinerja keuangan adalah sebagai berikut.

3.1. KPMM BPRS di Jawa Barat

Gambaran Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPRS di Jawa Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1. Tingkat kecukupan modal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menunjukkan variasi yang cukup signifikan. KPMM mencerminkan kemampuan bank dalam menyediakan modal yang memadai untuk menutup risiko kerugian dari kegiatan operasionalnya. Semakin tinggi nilai KPMM, maka semakin kuat posisi permodalan bank dalam menghadapi potensi risiko



Gambar 1. KPMM BPRS di Jawa Barat tahun 2024

Nilai KPMM tertinggi ditunjukkan oleh PT BPRS Almadinah Tasikmalaya Perseroda sebesar 80,16%, yang mengindikasikan kondisi permodalan yang sangat kuat dan jauh di atas ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu sebesar 12%. Tingginya nilai tersebut mencerminkan kemampuan BPRS tersebut dalam menanggung risiko tanpa mengganggu kestabilan operasionalnya, sekaligus menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan permodalan. Posisi tertinggi kedua ditempati oleh PT BPRS Ri'fatul Ummah dengan KPMM sebesar 72,94%, diikuti oleh PT BPRS Daarut Tauhiid (Daarul Hayat) sebesar 51,72%. Ketiga BPRS tersebut dapat dikategorikan memiliki struktur permodalan yang sangat sehat, karena memiliki buffer modal yang besar terhadap kemungkinan risiko pembiayaan bermasalah atau penurunan aset produktif.

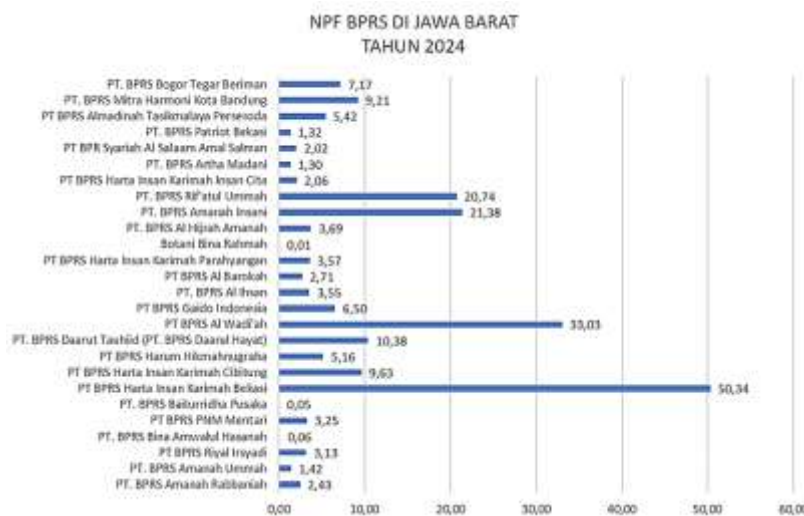
Sebaliknya, nilai KPMM terendah terdapat pada PT BPRS Gaido Indonesia dengan persentase hanya 5,70%, yang berarti berada di bawah ambang batas minimum permodalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki risiko permodalan yang tinggi, karena modal yang tersedia belum mencukupi untuk menutup potensi risiko secara optimal. Selain itu, PT BPRS Bogor Tegar Beriman juga memiliki nilai yang relatif rendah yaitu 11,69%, yang meskipun mendekati batas minimum, tetap menunjukkan perlunya penguatan struktur modal agar dapat meningkatkan daya tahan terhadap risiko keuangan.

Secara keseluruhan, jika dihitung rata-rata, nilai KPMM BPRS di Jawa Barat tahun 2024 adalah 24%, yang berarti secara umum tingkat kecukupan modal BPRS di provinsi ini tergolong cukup sehat. Namun demikian, adanya perbedaan yang cukup lebar antara nilai tertinggi dan terendah menunjukkan disparitas kemampuan permodalan antar BPRS, yang kemungkinan disebabkan oleh perbedaan skala usaha, tingkat profitabilitas, efisiensi manajemen risiko, serta strategi ekspansi pembiayaan. BPRS dengan KPMM yang tinggi umumnya memiliki manajemen risiko yang lebih konservatif dan portofolio pembiayaan yang terkelola dengan baik, sedangkan BPRS dengan KPMM rendah perlu memperkuat modal inti melalui peningkatan laba ditahan atau tambahan investasi dari pemegang saham.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara agregat, BPRS di Jawa Barat tahun 2024 berada dalam kondisi permodalan yang relatif baik, meskipun beberapa entitas masih memerlukan penguatan struktur modal agar dapat memenuhi standar kecukupan modal minimum secara berkelanjutan. Ketimpangan ini menjadi indikator penting bagi regulator dan manajemen internal bank untuk menilai efektivitas kebijakan permodalan serta menjaga stabilitas sistem keuangan syariah di tingkat daerah.

3.2. NPF BPRS di Jawa Barat

Gambaran Non Performing Financing (NPF) BPRS di Jawa Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2. Tingkat pembiayaan bermasalah antar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di provinsi ini menunjukkan variasi yang cukup tinggi. NPF merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur kualitas pembiayaan suatu bank, di mana semakin tinggi rasio NPF maka semakin besar risiko kredit macet yang ditanggung oleh bank. Nilai NPF mencerminkan sejauh mana pembiayaan yang disalurkan dapat kembali dengan lancar, sehingga rasio ini menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai kinerja dan stabilitas lembaga keuangan syariah.



Gambar 2. NPF BPRS di Jawa Barat tahun 2024

Gambar 2 menunjukkan bahwa nilai NPF tertinggi dimiliki oleh PT BPRS PNM Mentari dengan rasio mencapai 50,34%, menunjukkan kondisi pembiayaan bermasalah yang sangat berat. Angka tersebut jauh melampaui ambang batas ideal NPF yaitu dibawah 5%. Kondisi ini berarti lebih dari separuh pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS tersebut berada dalam kategori bermasalah, baik dalam bentuk pembiayaan macet, diragukan, maupun dalam perhatian khusus. Nilai tertinggi kedua dicatat oleh PT BPRS Daarut Tauhiid (Daarul Hayat) sebesar 33,03%, diikuti oleh PT BPRS Amanah Insani sebesar 21,38%, dan PT BPRS Ri'fatul Ummah sebesar 20,74%. Keempat BPRS ini tergolong memiliki risiko pembiayaan yang tinggi, sehingga memerlukan langkah strategis dalam restrukturisasi pembiayaan dan peningkatan pengawasan agar tidak berdampak lebih lanjut terhadap profitabilitas dan likuiditas.

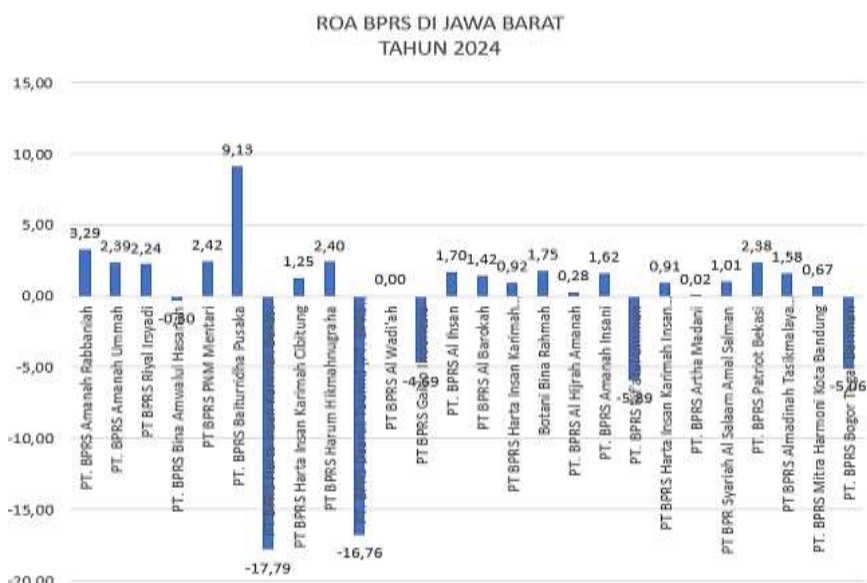
Sementara itu, nilai NPF terendah dimiliki oleh PT BPRS Botani Bina Rahmah dengan rasio hanya 0,01%, menandakan bahwa hampir seluruh pembiayaan yang disalurkan berada dalam kondisi lancar. Beberapa BPRS lain yang juga menunjukkan kinerja pembiayaan sangat baik adalah PT BPRS Baitur Ridha Pusaka dengan 0,05%, PT BPRS Bina Amwal Hasanah sebesar 0,06%, serta PT BPRS Artha Madani sebesar 1,30%. Nilai-nilai tersebut menunjukkan efektivitas manajemen risiko pembiayaan yang kuat, kemampuan analisis kelayakan yang baik, serta tingkat kedisiplinan nasabah yang tinggi dalam pembayaran angsuran.

Nilai rata-rata NPF BPRS di Jawa Barat pada tahun 2024 adalah 8% yang berarti rata-rata kualitas pembiayaan BPRS di Jawa Barat tergolong kurang baik, meskipun ada sebagian BPRS yang telah menunjukkan kinerja pembiayaan yang baik. Variasi yang lebar antara nilai tertinggi dan terendah mencerminkan adanya perbedaan kemampuan manajemen risiko antar BPRS di Jawa Barat.

Rasio NPF yang ideal bagi BPRS seharusnya berada di bawah 5%, karena hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan yang disalurkan berada dalam kondisi lancar dan risiko kredit macet masih dapat dikendalikan. Sebaliknya, apabila rasio NPF melebihi 5%, maka hal itu menunjukkan kualitas pembiayaan yang tidak baik dan mengindikasikan adanya potensi gangguan terhadap stabilitas keuangan bank. Oleh karena itu, bagi BPRS yang memiliki NPF tinggi perlu melakukan langkah korektif, seperti memperketat analisis kelayakan pembiayaan, meningkatkan sistem monitoring terhadap nasabah, serta memperkuat strategi restrukturisasi agar rasio pembiayaan bermasalah dapat ditekan ke tingkat yang lebih sehat.

3.3. ROA BPRS di Jawa Barat

Gambar 3 menunjukkan kondisi ROA BPRS di Jawa Barat tahun 2024. Nilai ROA tertinggi dimiliki oleh PT. BPRS Bahari Ridho Allah Sukabumi sebesar 9,13%, sedangkan nilai terendah terdapat pada PT. BPRS Harta Insan Karimah Cibitung dengan -17,79%. Secara keseluruhan, rata-rata ROA BPRS di Jawa Barat adalah -0,5% berarti tingkat pengembalian atas aset BPRS bernilai negatif, yang menunjukkan bahwa rata-rata BPRS di Jawa Barat mengalami kerugian dalam memanfaatkan asetnya pada tahun 2024.



Gambar 3. ROA BPRS di Jawa Barat tahun 2024 .

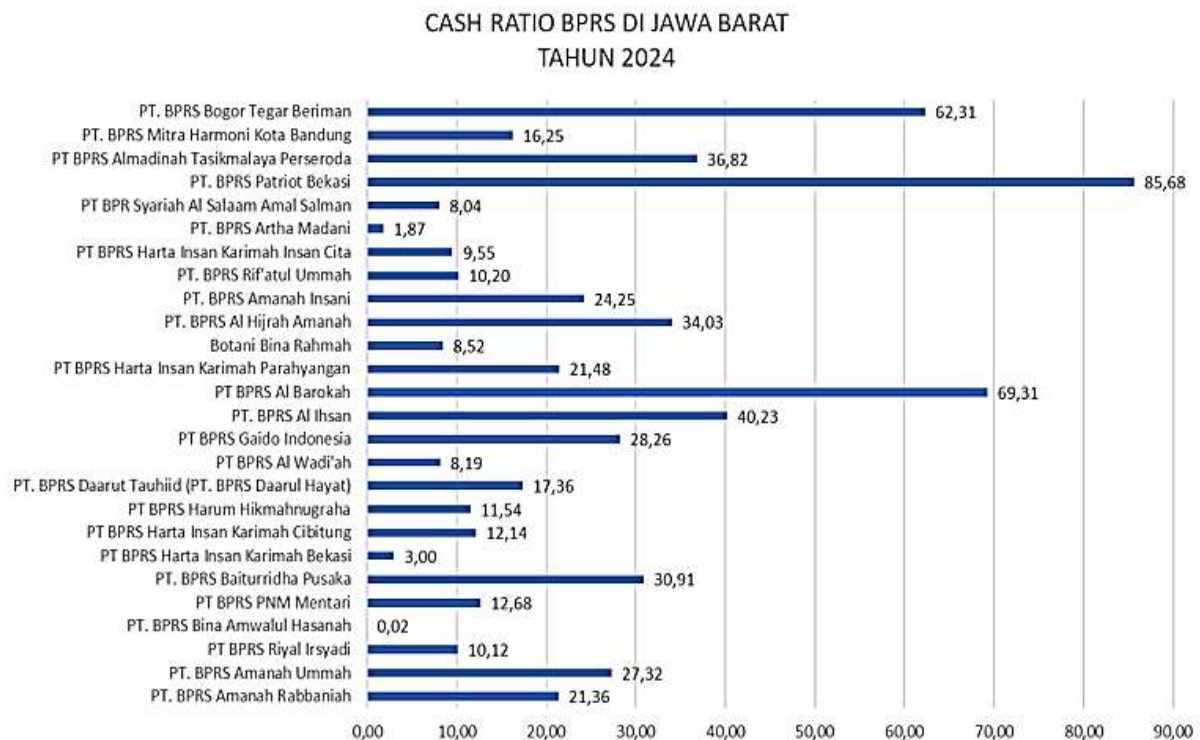
Pada gambar 3 terlihat bahwa hanya sebagian kecil BPRS yang mampu mencatatkan kinerja sangat baik. PT. BPRS Bahari Ridho Allah Sukabumi (9,13%), PT. BPRS Amanah Rabbaniyah (3,29%), dan PT. BPRS Riyal Irsyadi (2,24%) termasuk dalam kelompok bank yang memiliki profitabilitas tinggi dan efisien dalam mengelola asetnya. Nilai ROA di atas 2% menunjukkan kemampuan manajemen yang baik dalam menghasilkan keuntungan. Selain itu, beberapa BPRS seperti PT. BPRS Al Hijrah Amanah (1,62%), PT. BPRS Artha Madani (0,91%), dan PT. BPRS Patriot Bekasi (2,38%) juga memperlihatkan kinerja yang cukup stabil dengan nilai ROA positif meskipun masih di bawah kategori sangat baik.

Sebaliknya, terdapat beberapa BPRS yang mengalami ROA negatif, menandakan kondisi keuangan yang kurang sehat. PT. BPRS Harta Insan Karimah Cibitung (-17,79%) dan PT. BPRS Harum Hikmanugraha (-16,76%) menunjukkan kinerja paling lemah dengan potensi kerugian signifikan. Kondisi tersebut bisa disebabkan oleh pembiayaan bermasalah yang tinggi, efisiensi operasional yang rendah, atau penurunan pendapatan. Selain itu, beberapa BPRS lain memiliki nilai ROA mendekati nol, seperti PT. BPRS Al Wadi'ah (0,00%) dan PT. BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan (0,28%), yang berarti tingkat pengembalian asetnya masih sangat rendah.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kinerja profitabilitas BPRS di Jawa Barat tahun 2024 masih bervariasi dan belum merata. Meskipun terdapat beberapa BPRS yang mampu mencatatkan keuntungan tinggi dan menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan aset, sebagian besar masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan laba dan menjaga stabilitas keuangan. Oleh karena itu, BPRS dengan nilai ROA rendah atau negatif perlu memperbaiki strategi bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat manajemen risiko agar dapat mencapai kinerja keuangan yang lebih sehat dan berkelanjutan di masa mendatang.

3.2. Cash Ratio BPRS di Jawa Barat.

Gambaran kondisi Cash Ratio BPRS di Jawa Barat dapat dilihat pada gambar 4. Cash Ratio merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas dan setara kas yang tersedia. Semakin tinggi nilai cash ratio, maka semakin tinggi pula tingkat likuiditas bank tersebut, artinya bank memiliki kemampuan yang baik untuk memenuhi kewajiban segera kepada nasabah maupun pihak ketiga. Sebaliknya, nilai yang terlalu rendah menunjukkan keterbatasan dana likuid dan potensi kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.



Gambar 4. CR BPRS di Jawa Barat tahun 2024

Berdasarkan gambar 4 dapat diketahui bahwa nilai cash ratio tertinggi dimiliki oleh PT BPRS Patriot Bekasi dengan persentase 85,68%, yang menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki cadangan kas yang sangat besar dibandingkan kewajiban lancarnya. Kondisi ini menggambarkan likuiditas yang sangat kuat, tetapi sekaligus dapat menunjukkan bahwa dana kas tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan pembiayaan produktif. Posisi berikutnya ditempati oleh PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan dengan 69,31%, serta PT BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung sebesar 62,31%. Ketiga BPRS ini dapat dikategorikan memiliki kondisi likuiditas yang sangat baik dan jauh di atas rata-rata, sehingga mampu menghadapi potensi penarikan dana mendadak dari nasabah tanpa mengalami tekanan keuangan.

Sebaliknya, nilai cash ratio terendah dimiliki oleh PT BPRS Bina Amwal Hasanah dengan hanya 0,02%, menunjukkan tingkat likuiditas yang sangat rendah dan berisiko tinggi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Nilai yang sangat kecil ini menandakan keterbatasan dana kas yang dimiliki, sehingga bank harus berhati-hati terhadap risiko mismatch antara aset dan kewajiban lancar. Selain itu, PT BPRS Artha Madani juga memiliki nilai yang sangat rendah yaitu 1,87%, yang menandakan posisi likuiditas yang lemah. BPRS dengan nilai di bawah 10% umumnya memerlukan perhatian khusus karena berada di ambang batas risiko likuiditas.

Jika dilihat secara keseluruhan, nilai rata-rata cash ratio BPRS di Jawa Barat tahun 2024 berada di kisaran sekitar 23,5% yang menunjukkan bahwa secara rata-rata, tingkat likuiditas BPRS di provinsi ini tergolong cukup sehat. Namun, adanya perbedaan yang sangat signifikan antara nilai tertinggi dan terendah mencerminkan ketimpangan dalam pengelolaan kas dan strategi likuiditas antar BPRS. Bank dengan cash ratio tinggi menunjukkan kemampuan menjaga likuiditas yang baik, tetapi bisa menandakan kurang optimalnya penyaluran dana ke sektor pembiayaan. Sementara itu, BPRS dengan cash ratio yang terlalu rendah menunjukkan potensi tekanan likuiditas yang dapat mengganggu operasional jika tidak diimbangi dengan pengelolaan dana yang efisien.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum BPRS di Jawa Barat tahun 2024 memiliki kemampuan likuiditas yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa BPRS yang perlu memperbaiki pengelolaan kasnya. Tingkat rasio yang terlalu tinggi memang mencerminkan keamanan keuangan, tetapi juga berpotensi menurunkan profitabilitas karena dana kas yang menganggur tidak memberikan imbal hasil. Sebaliknya, rasio yang terlalu rendah mengindikasikan risiko likuiditas yang tinggi dan dapat menurunkan kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, keseimbangan dalam pengelolaan kas menjadi kunci penting bagi BPRS untuk menjaga stabilitas dan kinerja keuangan yang berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kinerja keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Jawa Barat tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan BPRS secara umum tergolong cukup sehat, meskipun masih terdapat disparitas yang cukup besar antar lembaga. Dari sisi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), rata-rata nilai sebesar 24% menunjukkan bahwa BPRS di Jawa Barat memiliki struktur permodalan yang kuat dan mampu menanggung risiko keuangan, walaupun beberapa BPRS masih berada di bawah batas minimum yang ditetapkan oleh OJK, yaitu 12%.

Dari aspek Non-Performing Financing (NPF), rata-rata nilai sebesar 8% mengindikasikan bahwa kualitas pembiayaan masih perlu ditingkatkan karena melebihi batas ideal sebesar 5%. Tingginya rasio NPF ini menunjukkan adanya risiko pembiayaan bermasalah yang dapat mengganggu profitabilitas dan kesehatan keuangan bank. Selanjutnya, kinerja Return on Assets (ROA) dengan rata-rata -0,5% menandakan bahwa secara keseluruhan BPRS di Jawa Barat belum mampu memanfaatkan asetnya secara optimal untuk menghasilkan laba, bahkan sebagian besar mengalami kerugian. Hal ini memperlihatkan perlunya peningkatan efisiensi operasional dan pengelolaan aset yang lebih produktif. Sementara itu, dari sisi Cash Ratio (CR), rata-rata sebesar 23,5% menunjukkan bahwa kondisi likuiditas BPRS di Jawa Barat relatif baik. Meskipun demikian, perbedaan yang signifikan antara BPRS dengan rasio tinggi dan rendah mengindikasikan perlunya keseimbangan dalam pengelolaan kas agar likuiditas tetap terjaga tanpa mengorbankan profitabilitas.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja keuangan BPRS di Jawa Barat pada tahun 2024 masih memerlukan penguatan terutama pada aspek profitabilitas dan kualitas pembiayaan. Upaya peningkatan efisiensi manajemen aset, pengendalian risiko pembiayaan, serta optimalisasi penggunaan dana perlu dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, sinergi antara kebijakan regulator dan strategi internal BPRS sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan dan mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah yang sehat dan berdaya saing di tingkat regional maupun nasional.

Referensi

1. Aini, R. N., & Thoriq, A. M. (2020). Pelatihan Analisis Common Size dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada PT . BPRS PNM Mentari Tahun 2019-2020. *Prestise: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi Dan BIsnis*, 01(02), 47.
2. Anggrainy, M., Gusnardi, G., & Indrawati, N. (2023). PENGARUH CASH RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, RETURN ON ASSET DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN DENGAN RISIKO BISNIS SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Pada Perusahaan Kompas 100 Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *Jurnal Daya Saing*, 9(3), 555–564. <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v9i3.1365>
3. Dessi Herliana, & Setiadi. (2021). PENGARUH CURRENT RATIO DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP RETURN ON ASSETS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SUB SEKTOR BATUBARA YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016-201. *JIMA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 1–17.
4. Fitri Findiani, & Maharani Maharani. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan, Pembiayaan UMKM dan Kecukupan Modal Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i1.1229>
5. Hapsari, R. N. (2022). PENGARUH KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM, RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR, RISIKO OPERASIONAL DAN RISIKO LIKUIDITAS TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK. *Parsimonia - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 28–43. <https://doi.org/10.33479/parsimonia.v9i1.584>
6. Kharisma Aulia Insani, & Nur Amalina. (2023). Analisis Rasio Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis*, 1(1), 8–14. <https://doi.org/10.30787/jiemb.v1i1.1178>
7. Maulana, F. I. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2018-2021. *Mabny: Journal of Sharia Management and Business*, 2(01), 241–248. <https://doi.org/10.19105/mabny.v2i01.5375>
8. Maulina, R., Soufyan, D. A., Rahmazaniati, L., Vonna, S. M., & Rahmadani, I. (2020). ANALISIS PERAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) TERHADAP PENINGKATAN KINERJA UMKM (STUDI PADA PT. BPRS BAITURRAHMAN). *Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 107. <https://doi.org/10.35308/akbis.v4i2.3174>
9. Nurkhalifa, U., Machpudin, A., & Setiawati, R. (2023). Pengaruh kecukupan modal dan efisiensi operasional terhadap kinerja keuangan perbankan umum konvensional di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. In *Jurnal Dinamika Manajemen* (Vol. 11, Issue 3).
10. Pardede, D. H., Nawawi, Z. M., & Atika, A. (2023). Pengaruh Total Asset Turnover (TAT), Kualitas Aktiva Produktif (KAP) terhadap Profitabilitas (ROA) dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2022. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 83–106. <https://doi.org/10.24260/jkubs.v2i2.1929>
11. Qanita, A. (2021). Analisa Komparasi Kinerja Bank Syariah Melalui Rasio Keuangan dan Indeks Maqashid Syariah (Studi pada BPRS Bhakti Sumekar Kota Sumenep). In *Tesis* (pp. 1–97). UIN Sunan Ampel Surabaya.
12. Safkaur, O. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Siklus Hidup Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Era Pandemi. *Is The Best Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise This Is Link for OJS Us*, 6(2), 166–180. <https://doi.org/10.34010/aisthebest.v6i2.4935>
13. Silfia, D., Jalaludin, J., Marlina, W., & Tripramudi, A. (2022). Analisis ROA, ROE dan FDR Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT. BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Pada Periode Maret 2019-Juni 2020. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 6(2), 2018–2235. <https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.409>
14. Uci Rosalinda, U., Cris Kuntadi, & Rachmat Pramukty. (2022). LITERATURE REVIEW PENGARUH GCG, CSR DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(6), 667–673. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i6.1108>
15. Veriana, L., & Wirman, W. (2023). PENGARUH CAR, BOPO, DAN FDR TERHADAP NPF BANK UMUM SYARIAH. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 17(1), 58–68. <https://doi.org/10.33373/mja.v17i1.5073>